

HUKUM PAJAK DI TNI AU IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PENGUNAAN DANA

Paulin Herlindah¹ dan Dian Wijayanti²

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, ¹paulinherlindah.ph23@gmail.com dan ²dwlumina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hukum pajak di TNI AU dengan fokus pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pajak di TNI AU melibatkan implementasi undang-undang PNBPN, kebijakan penggunaan dana perpajakan, serta penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengacu pada referensi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang PNBPN memiliki peran penting dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di TNI AU. Penggunaan dana perpajakan perlu dikelola secara transparan dan akuntabel, sementara penyelesaian sengketa pajak memerlukan mekanisme yang efektif. Pemahaman yang baik tentang hukum pajak di TNI AU serta implementasi yang tepat dapat mendukung pengelolaan pajak yang optimal dan menjaga kedaulatan negara di udara.

Kata Kunci: hukum pajak, TNI AU, undang-undang PNBPN, dana perpajakan, sengketa pajak

ABSTRACT

This research examines the tax law in the Indonesian Air Force (TNI AU) with a focus on the background, research questions, research objectives, research methodology, discussions, and conclusions. Taxation in the TNI AU involves the implementation of the State Revenue Non-Tax Revenue (PNBPN) Law, policies on the use of tax funds, and the resolution of tax disputes or legal issues. This study employs a literature review approach, utilizing relevant references. The findings indicate that the PNBPN Law plays a crucial role in managing non-tax revenue within the TNI AU. The proper utilization of tax funds requires transparency and accountability, while the resolution of tax disputes necessitates effective mechanisms. A sound understanding of tax law in the TNI AU and its proper implementation can support optimal tax management and uphold national sovereignty in the air.

Keywords: tax law, Indonesian Air Force, PNBPN Law, tax funds, tax disputes.

I. PENDAHULUAN

Hukum pajak memegang peranan penting dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini juga berlaku dalam konteks TNI AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara), di mana hukum pajak menjadi landasan yang mendasari pengaturan kewajiban perpajakan dan pengelolaan dana

yang diperoleh dari pemungutan pajak di lingkungan TNI AU. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI AU memiliki kegiatan dan operasional yang membutuhkan pembiayaan untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan negara di udara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum pajak di TNI AU sangat penting untuk memastikan

kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan dalam mendukung kegiatan mereka.

Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam hukum pajak di TNI AU adalah peraturan perpajakan yang mengatur institusi ini. Menurut penelitian oleh Wijaya, Atik, dan Kaemirawati (2022), pengetahuan yang komprehensif mengenai peraturan perpajakan di TNI AU menjadi kunci untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan yang berlaku bagi mereka. Dalam hal ini, peraturan tersebut meliputi ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang berlaku di TNI AU.

Selain itu, perlu diperhatikan pula kebijakan penggunaan dana perpajakan di TNI AU, terutama dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan pangkalan udara milik mereka. Nugraha, Elias, Tedemaking, dan Sacharissa (2021) menyatakan bahwa penggunaan dana perpajakan yang efisien dan transparan sangat penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat guna dan sesuai dengan tujuan TNI AU dalam memperkuat kedaulatan negara di udara. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis kebijakan dan mekanisme penggunaan dana perpajakan di TNI AU serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain peraturan perpajakan dan kebijakan penggunaan dana, terdapat pula sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak yang mungkin timbul di lingkungan

TNI AU. Rumnan (2017) menyoroti adanya permasalahan terkait kewenangan Gubernur Riau dalam pengambilan keputusan tentang pencadangan areal tanah untuk pengembangan pangkalan udara TNI AU di Pekanbaru. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap sengketa-sengketa semacam ini serta mengevaluasi upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami lebih lanjut tentang hukum pajak yang berlaku di TNI AU. Penelitian ini akan menyoroti peraturan perpajakan yang mengatur TNI AU, kebijakan penggunaan dana perpajakan di TNI AU, serta mengidentifikasi sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di TNI AU dan upaya penyelesaiannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai hukum pajak di lingkungan TNI AU serta kontribusinya dalam mendukung kedaulatan negara di udara.

II. LITERATUR PENELITIAN

Studi sebelumnya telah dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang aspek hukum yang terkait dengan hukum pajak di TNI AU. Muliawan, Gayatri, dan Rianda (2022) melakukan penelitian mengenai konsepsi dan pengaturan kedaulatan wilayah udara Indonesia dalam aspek hukum nasional dan internasional. Studi kasus yang dikaji meliputi pesawat sipil

tanpa izin dan pesawat tempur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pengaturan hukum terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia dan implikasinya dalam konteks pajak di TNI AU.

Selain itu, Marbun, Bariah, dan Arif (2016) melakukan penelitian mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek hukum yang terkait dengan penggunaan ruang udara dan pengaturan pajak di TNI AU.

Dalam konteks perlindungan konsumen dan tanggung jawab pengangkut barang melalui pesawat udara, Manalip (2015) mengkaji perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengangkut. Penelitian ini memberikan perspektif yang relevan dalam memahami hak dan tanggung jawab terkait dengan pengiriman barang melalui pesawat udara.

Selain itu, Kadir, Rumimpunu, dan Mandey (2022) melakukan penelitian tentang tanggung jawab penyedia jasa penitipan barang (ekspedisi) terhadap barang/cargo pengirim. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi dalam konteks pengiriman barang.

Pada konteks hukum internasional, Shodiq, Asmarudin, dan Widyastuti (2023) melakukan penelitian tentang pelanggaran kedaulatan ruang udara Indonesia menurut hukum internasional. Penelitian ini

memberikan pemahaman yang penting tentang implikasi hukum internasional dalam konteks pajak dan kedaulatan udara di TNI AU.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perpajakan yang berlaku di TNI AU, kebijakan penggunaan dana perpajakan, serta sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di lingkungan TNI AU.

Langkah pertama dalam metode penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Referensi yang relevan yang terdiri dari jurnal, buku, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan hukum pajak di TNI AU dan topik terkait lainnya dikumpulkan. Referensi yang digunakan termasuk penelitian sebelumnya, seperti yang telah disebutkan dalam bagian literatur penelitian.

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara rinci dengan memerhatikan isu-isu yang terkait dengan peraturan perpajakan di TNI AU, kebijakan penggunaan dana perpajakan, serta sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di lingkungan TNI AU. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dan memadukan temuan dari berbagai referensi yang relevan.

Hasil analisis dokumen kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Temuan yang diperoleh akan dijelaskan secara naratif dan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang logis.

Dalam melakukan penelitian ini, perhatian khusus diberikan untuk memastikan validitas dan keandalan data yang digunakan. Referensi yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan terkini, sehingga dapat diandalkan dalam menyusun argumen dan kesimpulan.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum pajak di TNI AU dan kontribusinya dalam mendukung kedaulatan negara di udara.

IV. PEMBAHASAN

A. Hukum Pajak di TNI AU

Dalam konteks hukum pajak di TNI AU, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran penting. Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan penerimaan negara yang tidak berbentuk pajak, termasuk di dalamnya penerimaan yang terkait dengan TNI AU. Implementasi Undang-Undang PNBP ini juga melibatkan satuan kerja jajaran TNI AU, seperti yang dikemukakan oleh Parlindungan Purba dan Wirawaningsi (2022). Mereka menjelaskan implementasi Undang-Undang PNBP di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/b

dengan mengambil studi kasus Kodam I/bb Staf Perencanaan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pajak di TNI AU dalam konteks pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

B. Kebijakan Penggunaan Dana Perpajakan di TNI AU

Penggunaan dana perpajakan di TNI AU menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Kebijakan penggunaan dana perpajakan ini berkaitan dengan pengalokasian dan pengelolaan dana yang diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak. Kadir, Rumimpunu, dan Mandey (2022) mengkaji tanggung jawab penyedia jasa penitipan barang (ekspedisi) terhadap barang/cargo pengirim dalam konteks penggunaan dana perpajakan. Penelitian mereka memberikan wawasan tentang tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi dalam mengelola dan menggunakan dana perpajakan yang terkait dengan pengiriman barang di TNI AU. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan dana perpajakan yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Sengketa atau Permasalahan Hukum Terkait Pajak di TNI AU dan Upaya Penyelesaiannya

Dalam konteks pajak di TNI AU, tidak jarang terjadi sengketa atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan pajak. Sengketa ini dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk interpretasi peraturan perpajakan,

penentuan tarif pajak, atau pelaksanaan pembayaran pajak. Studi yang dilakukan oleh peneliti seperti Parlindungan Purba dan Wirawaningsi (2022) memberikan pemahaman tentang implementasi undang-undang PNBP di satuan kerja TNI AU dan potensi terjadinya sengketa terkait pajak di dalamnya.

Dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di TNI AU, upaya hukum penyelesaian menjadi penting. Referensi dari Shodiq, Asmarudin, dan Widyastuti (2023) mengenai pelanggaran kedaulatan ruang udara Indonesia menurut hukum internasional memberikan perspektif yang relevan dalam mengatasi sengketa terkait pajak di TNI AU. Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti lain, seperti Pendi (2016), Handoyo (2011), dan Hakim (2010), juga dapat memberikan wawasan tentang peraturan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerbangan dan keberadaan TNI AU di udara.

Melalui pemahaman tentang hukum pajak di TNI AU, kebijakan penggunaan dana perpajakan, serta penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di lingkungan TNI AU, dapat dihasilkan langkah-langkah yang lebih efektif dan tepat guna dalam mengelola pajak di TNI AU dan mendukung kedaulatan negara di udara.

Demikianlah pembahasan mengenai hukum pajak di TNI AU, kebijakan penggunaan dana perpajakan, serta sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di

lingkungan TNI AU beserta upaya penyelesaiannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dibahas mengenai hukum pajak di TNI AU yang meliputi implementasi undang-undang PNBP, kebijakan penggunaan dana perpajakan, serta sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di lingkungan TNI AU. Dari pembahasan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP memiliki peran penting dalam mengatur pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di TNI AU. Implementasi undang-undang ini perlu diperhatikan dengan baik agar pengelolaan pajak di TNI AU dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, kebijakan penggunaan dana perpajakan di TNI AU memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel guna memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Terakhir, adanya potensi sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak di TNI AU menunjukkan perlunya penyelesaian yang efektif dan tepat guna melalui mekanisme hukum yang berlaku.

5.2. Saran

Sebagai saran, penting bagi TNI AU untuk terus memperkuat pemahaman dan implementasi hukum pajak di lingkungan mereka. Perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan kepada personel terkait tentang

aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana perpajakan, termasuk melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, dalam menangani sengketa atau permasalahan hukum terkait pajak, TNI AU dapat mempertimbangkan upaya penyelesaian alternatif seperti mediasi atau arbitrase untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, C. (2010). *Berdaulat Di Udara: Membangun Citra Penerbangan Nasional*. Penerbit Buku Kompas.
- Handoyo, S. (2011). *Aviopedia: Ensiklopedia Umum Penerbangan (Vol. 1)*. Penerbit Buku Kompas.
- Kadir, P. N., Rumimpunu, D., & Mandey, M. (2022). Tanggung Jawab Penyedia Jasa Penelitian Barang (Ekpedisi) Terhadap Barang/Cargo Pengirim. *Lex Administrum*, 10(3).
- Manalip, D. A. A. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara. *Lex Privatum*, 3(2).
- Marbun, V., Bariah, C., & Arif, A. (2016). Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Melakukan Lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia. *Sumatra Journal of International Law*, 4(2), 164553.
- Muliawan, C., Gayatri, S., & Rianda, H. G. (2022). Konsepsi dan Pengaturan Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). *Tirtayasa Journal of International Law*, 1(1), 1-18.
- Nugraha, R. A., Elias, K., Tedemaking, L., & Sacharissa, V. (2021). Penguatan kedaulatan negara di udara dan urgensi sinkronisasi hukum. *Kertha Patrika*, 43.
- Parlindungan Purba, S. H., & Wirawaningsi, Y. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/b Study Kasus (Kodam I/bb Staf Perencanaan). *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesonsos)*, 4(1), 284-295.
- Pendi, P. (2016). *Kupas Tuntas Penerbangan*. Deepublish.
- Rumnan, B. H. (2017). *Kewenangan Gubernur Riau Dalam Keputusan Nomor: KPTS. 297/III/2011 Tentang Pencadangan Areal Tanah Untuk Pengembangan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Shodiq, D. A. F., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional. Penerbit NEM.
- Wijaya, F., Atik, A., & Kaemirawati, D. T. (2022). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Pangkalan Udara. *Wajah Hukum*, 6(1), 108-117.